

## ARAH POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI MASA DISRUPSI

Suparlan<sup>1</sup>, Sutama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
[lanbrow82@gmail.com](mailto:lanbrow82@gmail.com)<sup>1</sup>, [sutama@ums.ac.id](mailto:sutama@ums.ac.id)<sup>2</sup>

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 26-06-2020  
Direvisi 1 : 18-08-2020  
Direvisi 2 : 22-08-2020  
Disetujui : 22-08-2020  
Online : 04-09-2020

#### Kata Kunci:

Politik pendidikan;  
Masa disrupsi.

#### Keywords:

Education politics;  
Disruption period.

### ABSTRAK

**Abstrak:** Perkembangan zaman semakin sulit untuk diprediksi, dari zaman purba yang masyarakatnya hidup dengan pola nomaden sampai pada era industry 4.0 sekarang ini, yang juga akan segera ditinggalkan untuk masuk ke era 5.0. Artikel ini akan mengkaji arah politik pendidikan Islam di Indonesia dalam masa disrupsi. Pembahasan menggunakan metode studi pustaka. Sumber-sumber informasi yang dikumpulkan merupakan hasil kajian-kajian sebelumnya, baik berupa artikel, buku, atau karya tulis ilmiah lainnya yang terbit di jurnal baik nasional maupun internasional, web maupun media-media publikasi ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa roda politik serta kekuasaan yang sedang memegang serta mengendalikan negara adalah pihak yang sangat menentukan arah dan kebijakan pendidikan. Negara dengan politik pendidikan yang buruk akan membawa arah pendidikan yang buruk pula. Arah pendidikan di Indonesia saat ini sedang menuju pada dehumanisasi, dimana pelaksanaan kurikulum disampaikan dengan basis pemanfaatan teknologi informatika. Termasuk dalam pendidikan Islam. Penggunaan alat peraga aplikasi pada smartphone menjadi sangat diperlukan. Tetapi untuk pendidikan Islam masih sangat diperlukan adanya komunikasi langsung antara peserta didik dengan guru, karena untuk tetap memelihara asas humanisme dan untuk menampilkan keteladanan guru kepada para peserta didiknya.

**Abstract:** The development of the times is increasingly difficult to predict, from ancient times where people lived with a nomadic pattern until the industrial era 4.0 today which will also soon be abandoned to enter the era of 5.0. This article will examine the political direction of Islamic education in Indonesia in a period of disruption. The discussion uses the literature study method. The sources of information collected are the results of previous studies, whether in the form of articles, books, or other scientific papers published in journals both nationally and internationally, the web and other scientific publication media. Based on the results of the study, it was found that the political wheel and the power that is currently holding and controlling the state are the parties who largely determine the direction and policy of education. Countries with poor education politics will also lead to poor education. The direction of education in Indonesia is currently heading towards dehumanization, where curriculum implementation is delivered on the basis of the use of information technology. Included in Islamic education. The use of application props on smartphones is very necessary. But for Islamic education there is still a need for direct communication between students and teachers, because in order to maintain the principle of humanism and to display the teacher's example to the students.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### A. LATAR BELAKANG

Sejak adanya manusia di bumi ini telah mengalami berbagai macam perkembangan, baik perkembangan jumlah, perkembangan kultur, perkembangan ilmu pengetahuan, sampai pada perkembangan teknologi dewasa ini. Bagi penganut agama samawi Yahudi, Nasrani, dan Islam telah

sepakat bahwa nenek moyang mereka adalah Adam dan Hawa. Dari yang semula hanya dua orang telah berkembang sampai seperti saat ini. Mengenai perkembangan jumlah manusia sebagaimana dewasa ini penduduk dunia PBB memprediksi pada tahun 2019 kenaikan setiap harinya sejumlah 224.496 jiwa yang pada tahun 2020 akan mencapai

7.713.468.100 jiwa (Hidayat, 2015). Dari sisi kultur (kebudayaan) mengalami perkembangan dari pola masyarakat nomaden, meningkat ke pola pertanian, berkembang sampai ke pola industri. Pola industri sekarang ini adalah pola era industri 4.0 yang dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera ditinggalkan untuk menuju ke era industri 5.0 (Rahmawati, 2018). Demikian juga mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah nampak dari keadaan sekarang ini. Perkembangan teknologi paling tidak dalam dua dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Segala keperluan dapat tersedia dengan cepat, bukan hanya sekedar keperluan konsumtif saja tetapi bahkan keperluan akan informasi.

Perkembangan teknologi ditopang oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Dunia ilmu pengetahuan tidak lepas dari dunia pendidikan, karena berkembangnya ilmu pengetahuan diawali dari dunia pendidikan. Sedangkan dunia pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan sistem yang berarti arah kebijakannya ditentukan oleh politik pendidikan. Politik pendidikan inilah yang akan memberikan arah pendidikan yang dicanangkan oleh negara. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai arah politik pendidikan Islam yang ditetapkan di Indonesia, baik mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa disrupsi sekarang ini. Kebijakan-kebijakan strategis pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan manifestasi dari politik pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah, sehingga kelompok masyarakat ini dapat terangkat kualitas hidupnya baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya (Sarnoto, 2012).

Sejarah Indonesia diwarnai dengan banyak keadaan, baik ketika masih pada masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan dengan beberapa orde yang sudah dilalui yaitu orde lama, orde baru, sampai orde reformasi sekarang ini. Masa-masa ini tidak lepas dari peran politik yang berkembang. Dalam hal politik, masa disrupsi akan mengarah pada digitalisasi sistem politik (Bashori, 2018).

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, masa disrupsi telah dengan masif memasuki sendi-

sendi kehidupan sekarang ini. Disrupsi merupakan masa ketika perubahan terjadi sedemikian cepat dan tidak dapat diduga-duga, mendasar, dan menyasar ke hampir semua aspek kehidupan (Bashori, 2018). Dengan keadaan yang tak terkendali ini, maka Islam harus hadir dengan memberikan arah sekaligus kontrol, lebih-lebih pada politik pendidikannya sebagai politik pendidikan Islam.

Dasar-dasar dogmatis agama Islam adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an serta sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Agama Islam memiliki ajaran yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-'Alaq ayat 1 sampai 5, sebagai berikut:

1. إقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang menciptakan,

2. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. إقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

3. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Mahamulia,

4. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

4. Yang mengajar (manusia) dengan pena.

5. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Kemenag, 2020).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* no. 3913).

Ayat dan hadits tersebut di atas adalah salah satu dari sekian banyak dalil yang memerintahkan umat Islam untuk belajar melalui proses pendidikan. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari sangatlah luas dengan ilmu agama Islam sebagai kewajiban utama kemudian ilmu-ilmu dunia sebagai kewajiban selanjutnya sesuai dengan kemampuan dalam menguasai ilmu yang dipelajari.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan pelayanan institusi kepada khalayak. Masyarakat harus terlayani akan kebutuhan pendidikannya. Pendidikan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, maka dengan daya apapun pemerintah harus mengusahakan pendidikan secara layak bagi

warga negaranya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik bukan sebagai bagian dari kebijakan publik (Arifin, 2018).

Kajian politik pendidikan Islam mempunyai fungsi untuk memberikan orientasi berpikir realistis, bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktik pendidikan, tetapi lebih jauh dari itu politik pendidikan Islam adalah praktik pendidikan yang bermuatan dakwah. Pendidikan Islam mempunyai ciri, warna, bahkan muatan tersendiri dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Namun demikian pola pendidikan Islam dapat disandingkan dengan pola pendidikan pada umumnya, bahkan bisa untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Di Indonesia, Pendidikan Islam sudah sering mengalami perubahan serta perkembangan yang mengikuti pola perkembangan peta politik pendidikan nasional. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam ditempuh dengan mendirikan pondok pesantren-pondok pesantren serta sekolah-sekolah umum yang berbasis Islam atau madrasah (Machali, 2018: 172).

Politik pendidikan Islam telah mengalami pasang surut yang tidak lepas dari faktor siapa yang memegang kendali kekuasaan/pemerintahan. Kebijakan pemegang kekuasaan pemerintahan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan sistem pendidikan yang ditempuh. Politik/intervensi kebijakan mempunyai pengaruh pada eksistensi pesantren dan madrasah (Supriadin, 2014). Lalu bagaimana arah politik pendidikan Islam di Indonesia ke depan pada masa disrupsi ini? Dalam penelitian ini permasalahan tersebut akan dikaji.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah riset literature. Referensi adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk memperkuat satu pernyataan atau lebih sehingga pernyataan tersebut menjadi kuat dan tegas. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Arikunto, Sugiyono, dkk.: 2019).

Penelitian menfokuskan pada arah politik pendidikan Islam pada masa disrupsi. Politik

pendidikan adalah menyangkut kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan. Persoalan kebijakan pendidikan adalah merupakan keputusan politik (Abdullah, 2013). Persoalan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah (Shabir U., 2016).

Keabsahan data politik pendidikan Islam pada masa disrupsi adalah dengan menggunakan triangulasi dari berbagai sumber referensi dan perpanjangan waktu. Dalam kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh perlu diyakini dan benar agar hasil dapatan kajian boleh dipercayai dan tidak dipertikaikan kesahihannya (Arikunto, Sugiyono, dkk. 2019). Data yang telah dikumpulkan perlu dicek keabsahannya untuk dikenali validitasnya. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi (Zanaton, Salasiah Hanin, Tengku Intan Zarina, & Mohd Noor, 2016).

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan reduksi data kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika, estetika, dan etika (Dapur Ilmiah, 2014). Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian dengan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala yang diteliti sehingga laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Politik Pendidikan**

Pendidikan Islam sebenarnya sudah masuk sejak Islam itu sendiri masuk ke bumi Nusantara. Sistem pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan, walaupun untuk saat ini kemajuan yang diperoleh belum cukup berarti dalam menjawab visi dan misi global (Abdullah, 2013). Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana perkembangan kurikulum yang pernah diterapkan. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah menerapkan 10 model kurikulum, yaitu:

## a. Kurikulum 1947.

Kurikulum ini memuat daftar mata pelajaran serta jam pengajarannya dan garis-garis besar pengajaran.

## b. Kurikulum 1952.

Memuat lima hal penting (1) mengurangi pendidikan pikiran, (2) setiap muatan pelajaran harus berhubungan dengan seni, (3) pendidikan watak, (4) pendidikan jasmani, serta (5) kewarganegaraan.

## c. Kurikulum 1964.

Memuat inti (1) manusia Indonesia berjiwa Pancasila, (b) kekuatan manusia, (c) luhurnya kepribadian kebudayaan nasional, (d) tingginya ilmu dan teknologi, (e) pergerakan dan revolusi rakyat.

## d. Kurikulum 1968.

Kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, memiliki kekuatan dan kesehatan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, bermoral, berbudi pekerti, serta berkeyakinan agama yang kuat.

## e. Kurikulum 1975.

Berorientasi kepada tujuan, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integrative, menekankan efisiensi dan efektifitas daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional berupa Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).

## f. Kurikulum 1984.

Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional (umum-khusus), dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), materi dikemas dengan pendekatan spiral, pengajarannya dengan pendekatan proses.

## g. Kurikulum 1994.

Bersifat kurikulum berbasis tujuan (*objective based curriculum*), pembagian waktu berdasar sistem catur wulan, materi sangat padat, dalam pembelajarannya melibatkan siswa aktif dalam belajar secara mental, fisik, dan social.

## h. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004.

Berciri khas ketercapaian kompetensi secara individual dan klasikal, berorientasikan hasil belajar dan keberagaman, pembelajaran menggunakan pendekatan dan variasi metode, menggunakan banyak sumber belajar yang memenuhi unsur edukatif, penilaian berdasarkan proses dan hasil belajar.

## i. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Karakteristik kurikulum ini adalah adanya kebebasan sekolah/guru dalam mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah, sampai dengan berlakunya kurikulum ini, visi dan misi yang jelas tentang arah dan tujuan pendidikan nasional Indonesia masih belum dimiliki, yang kecenderungannya adalah lebih bersifat mega proyek (Abdullah, 2013). Karakteristik KTSP dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan serta sistem penilaian (Widyaningrum, 2015).

## j. Kurikulum 2013 (K-13).

Merupakan kurikulum yang bersifat integrative, dengan menyeimbangkan kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan dengan pembelajaran yang holistic dan menyenangkan. Di samping itu, kurikulum 2013 dalam pembelajarannya menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan penilaian berbasis tes dan portofolio yang saling melengkapi.

Politik pendidikan merupakan arah kebijakan pendidikan yang akan diterapkan. Kalimat politik pendidikan mengacu kepada dua kata penyusunnya, yaitu politik dan pendidikan. Politik memiliki beberapa pengertian. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), antara lain (a) (pengetahuan) tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): ia lulusan dari akademi ..., (b) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat): Indonesia dan negara tetangga mengadakan kerja sama dalam bidang ..., (c) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi suatu masalah): ... pendidikan (KBBI.Kemdikbud.go.id 2020). Sedangkan menurut Deliar Noer dalam Sarnoto, 2012, politik adalah segala sikap atau aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan dengan maksud memengaruhi, dengan cara mengubah atau mempertahankan, bentuk susunan sosial masyarakat. Dari sini terdapat dua konsepsi tentang politik, yaitu tentang kaitannya dengan negara, mengenai

pemerintahan negara, serta kaitannya dengan kekuasaan, otoritas atau konflik (Sarnoto, 2012). Pengertian pendidikan sebagaimana terdapat dalam KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (KBBI.Kemdikbud,go.id 2020). Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan sebuah keniscayaan tuntutan bagi perkembangan anak, yang berarti pendidikan menuntut adanya kekuatan kodrati pada anak, agar anak dapat tercapai setinggi-tingginya keselamatan serta kesejahteraan sebagai manusia yang merupakan anggota masyarakat (Sarnoto, 2012). Dari pengertian politik dan pendidikan ini, maka untuk politik pendidikan juga memiliki pengertian tersendiri. Politik pendidikan merupakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Arah kebijakan pendidikan disesuaikan dengan kondisi bangsa yang sedang dialami untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah orientasi politik negara ke depannya.

## 2. Politik Pendidikan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Disebabkan Indonesia mengalami beberapa situasi sosial, di antaranya adalah masa purba, masa kerajaan (yang juga terdiri dari beberapa tipe kerajaan), masa penjajahan, masa kemerdekaan (yang juga terdiri dari beberapa orde), serta masa sekarang ini. Dalam bahasan ini akan ditampilkan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan menjadi beberapa periode.

### a. Masa Purba.

Latar belakang sosial pada masa ini adalah kebudayaan paleolitik. Kemudian pada masa kurang lebih 1.500 tahun SM perkembangan selanjutnya adalah kebudayaan neolitik. Dengan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme serta pola budaya maritim, politik pendidikan yang dimuat adalah agar generasi berikutnya memiliki kemampuan mencari nafkah, membela diri, hidup bersosial masyarakat dalam bentuk kuatnya gotong royong, taat kepada sistem adat dan kepercayaan yang dianut. Pendidikan dilakukan oleh lingkungan keluarga serta

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Muatan kurikulumnya merupakan pengetahuan mengenai cara mencari nafkah dengan sistem maritim, sikap serta nilai-nilai mengenai kepercayaan yang dianut dengan penyelenggaraan upacara-upacara adat dalam perujudannya untuk menyembah nenek moyang mereka.

Pada masa ini belum berkembang kebudayaan atau pengaruh apapun dari luar yang masuk ke Nusantara, termasuk Islam belum masuk ke wilayah Nusantara.

### b. Masa Kerajaan Hindu-Budha.

Latar belakang sosial pada masa ini adalah sebagian besar hidup di daerah yang subur di sekitar pesisir pantai. Mata pencaharian selain berburu, bercocok, nelayan, juga berdagang. Perdagangan dilakukan dengan para pedagang luar negeri terutama dari India yang singgah di daerah tersebut dalam perjalanan mereka ke negara-negara lain. Dengan ini, India membawa pengaruh pada kultur masyarakatnya yang kemudian menerapkan sebagaimana kultur di India dengan mengangkat para ketua suku menjadi raja-raja kecil di wilayah mereka.

Dengan adanya pengaruh kultur India ini, memunculkan stratifikasi masyarakat yang terdiri dari golongan yang dijamin serta golongan yang menjamin. Raja dan para pegawainya merupakan golongan yang dijamin sedangkan rakyat jelata sebagai golongan yang menjamin. Stratifikasi ini mengadopsi stratifikasi India yang dikenal dengan kasta, terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Syudra, dan Paria.

Struktur sosial yang demikian memunculkan politik pendidikan dimana pendidikan pada zaman itu diselenggarakan oleh keluarga yang dimanifestasikan dalam kehidupan langsung di masyarakat. Selain itu pendidikan juga dilaksanakan secara formal di lembaga pendidikan yang disebut paguron (perguruan). Sebagaimana yang berlangsung di kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Pada mulanya sang pandhita (guru) dilaksanakan oleh kasta Brahmana, kemudian dilanjutkan oleh para empu. Dalam hal ini guru terbagi atas dua tingkatan: **pertama** guru keraton, mengajar para anak raja dan bangsawan; **kedua** guru pertapa, yang mengajar para rakyat jelata tetapi guru masih sangat selektif dalam memilih muridnya yaitu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak lepas dari sistem yang berlaku di masyarakat saat itu, terutama dari status sosial.

Pembedaan tingkatan seperti ini merupakan implikasi dai adanya sistem feodalisme dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan. Pola politik pendidikan pada masa seperti ini diwarnai oleh ciri politik pendidikan yang bersifat aristokratis, artinya pendidikan masih terbatas hanya pada kalangan minoritas dari kalangan anak-anak Brahmana dan Ksatria, sedangkan justru dari kalangan mayoritas yaitu kalangan Waisya dan Syudra apalagi dari kasta Paria.

Pola politik pendidikan didasari atas sendi-sendi agama Hindu dan atau Budha yang ditunjukkan pada tujuan pendidikan yang menginginkan peserta didik yang taat dalam beragama, mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat dengan tatanan yang ada, paling tidak mampu membela diri sendiri ketika ada mara bahaya atau bahkan dapat mempertahankan negara dari ancaman negara lain. Walaupun belum tertata sebagaimana kurikulum pada masa akhir ini, tetapi pokok-pokok pengajarannya fokus pada pembelajaran agama, Bahasa Sansekerta (membaca dan menulis dengan Huruf Palawa), kesusastraan, keterampilan (memahat patung dan candi) serta ilmu perang. Sistem pengajaran yang dilakukan adalah dengan sistem nyantrik, yaitu murid tinggal serta mengabdikan kepada guru, sehingga dalam keseharian dan setiap saat murid dapat mengambil pelajaran dari guru. Ketika di Nusantara ini berkembang agama Budha, di kerajaan Sriwijaya, pendidikan sebagaimana tersebut di atas, juga berkembang Perguruan Tinggi Budha. Murid-murid selain dari kerajaan Sriwijaya dan sekitarnya bahkan juga terdapat murid yang datang dari Tiongkok, Jepang, serta Indocina. Di masa itu terdapat seorang guru agama Budha yang terkenal, bahkan mendapat gelar Maha Guru yaitu Maha Guru Darmapala. Candi-candi yang tersebar di wilayah Nusantara semisal candi Borobudur, Mendut, Kalasan adalah merupakan hasil dari penyebaran agama Budha serta sistem pendidikannya. Selain itu juga berkembang kesusastraan dengan hasil-hasil seperti kitab Pararaton, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Bharatayuda yang merupakan karya dari para empu, yang antara lain Empu Kanwa, Empu Seddah, Empu Panuluh, Empu Prapanca dan yang lainnya (Saharman, 2017).

Pada masa ini sebenarnya Islam sudah masuk ke Nusantara yaitu kisaran abad ke-7 Masehi. (Suryanegara, 2015;101) dengan ini

Islam sudah dikenal serta sekaligus menerapkan apa yang terdapat dalam ajaran-ajarannya melalui proses pendidikan. Politik pendidikan yang diterapkan adalah untuk memahamkan Islam kepada masyarakat dengan mengikis paham animisme dan dinamisme yang sebelumnya menjadi keyakinan di masyarakat saat itu, serta untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Paham animisme dan dinamisme harus dikikis karena paham ini sangat bertentangan dengan katuhidan dalam Islam, yang bila meyakini tentang kebenaran animisme dan dinamisme maka dia disebut sebagai musyrik (menyekutukan Allah) yang berimplikasi sebagai pelaku dosa besar yang akan masuk neraka sebagai balasannya di akhirat nanti jika tidak bertobat.

#### c. Masa Kerajaan Islam.

Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mengalami kemajuan yang sangat berarti bagi peradaban di Nusantara pada masanya. Namun kemajuan dari kerajaan-kerajaan tersebut berangsur-angsur mengalami kemunduran setelah datangnya dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara, antara lain adalah: (1) Teori Gujarat. Teori ini disampaikan oleh seorang orientalis Islam (mengaku beragama Islam) Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang bermadzhab tasawuf. (2) Teori Makkah. Teori ini disampaikan oleh Prof. Dr. Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para para wirausahawan Aran di pantai barat Sumatra yang kemudian berkembang sampai terbentuknya kerajaan Samodra Pasai pada tahun 1275. Jadi berdirinya kerajaan ini setelah Islam masuk sebelum tahun 1275 dan berkembang barulah berdiri kerajaan ini. Teori ini sangat sesuai dengan mayoritas madzhab yang dianut di Nusantara adalah madzhab Syafi'i. (3) Teori Persia. Teori ini disampaikan oleh Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia yang bermadzhab Syi'ah. Rupanya pendapat ini sulit ditemukan kesesuaiannya karena madzhab ini hampir tidak ditemukan pada waktu itu, baru dikenal pada akhir-akhir ini. (4) Teori Cina. Teori ini disampaikan oleh Prof. Dr. Slamet Muljana yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari

Cina, hal ini dibuktikan dengan bahwa Sultan Demak Panembahan Fatah merupakan keturunan Cina yang bernama Panembahan Jin Bun (yang merupakan nama Cina) termasuk para Wali Sanga (karena juga memiliki nama Cina). Tetapi hal ini dapat lemahkan oleh kenyataan bahwa dalam penukilan sejarah di Cina, setiap nama daerah atau orang di luar Cina juga dibahasakan dengan Bahasa Cina, misalnya nama Ratu Suhita sebagai Ratoe Keradjaan Madjapahit dari kerajaan Keradjaan Hindoe Madjapahit diberi nama Cina Su King Ta.

Dalam hal ini menurut penulis Teori Makkah yang mendekati kebenaran (Suryanegara, 2015; 101-103).

Nusantara yang memiliki letak yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan antarnegara, menjadi tempat singgah sementara oleh pedagang, baik dari negara-negara di Asia (terutama dari Arab, Persia, India, China), Afrika, dan Eropa. Pedagang dari Asia terutama dari Timur Tengah yang beragama Islam, selain singgah di kepulauan Nusantara juga mengadakan dakwah Islamnya. Dari sini dimulailah raja-raja dan penduduk yang tinggal di pesisir pantai banyak yang memeluk agama Islam. Termasuk kerajaan Peureulak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara semasa kekhalifahan 'Umar bin Khatthab R.A. Bahkan pada pertengahan abad ke-14 kota Bandar Malaka ramai dikunjungi oleh para pedagang dari wilayah Asia Barat dan Jawa (Jawa yang waktu itu dalam wilayah kerajaan Majapahit). Dari komunikasi ini juga berpengaruh terhadap mulai tersebarnya agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit, tambahan pula, pada perkembangan berikutnya secara khusus ada pendakwah yang datang ke wilayah kerajaan Majapahit. Para pendakwah itulah yang kemudian dikenal sebagai Wali Sanga (Sembilan Wali), walaupun secara pasti jumlah pendakwah tidak hanya sembilan orang tersebut. Dengan dimulainya kemunduran kerajaan Majapahit serta dari peran Wali Sanga ini pula kemudian mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa. Pendidikan Islam melalui lembaga surau merupakan lembaga pendidikan tertua sejak keberadaan Agama Hindu-Budha di Nusantara (Saharman, 2017).

Dengan demikian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, antara lain kerajaan Peureulak kemudian menjadi kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak,

kerajaan Aceh Darrussalam, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, kerajaan Islam Pajang, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Banjar, dan yang lainnya (Muchsin, 2019).

Karena sistem pemerintahannya adalah kerajaan, maka hampir tidak ada kekawatiran dari para raja akan adanya instabilitas di pemerintahan, sehingga politik pendidikannya adalah pendidikan yang didasarkan pada sendi-sendi ajaran agama Islam yang bertujuan pada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga memperoleh keberhasilan dan keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal shalih. Selain itu bahwa pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih terdapat di masyarakat berusaha untuk berangsur-angsur dikurangi dengan dakwah Islam, selain juga untuk berdkwah kepada masyarakat Hindu-Budha yang tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Sistem yang digunakan adalah mengadopsi sistem pendidikan pada pola Hindu-Budha, yaitu dengan sistem pesantren untuk formalnya sedangkan yang informal adalah di keluarga serta interaksi sosial (Sabarudin, 2015). Walaupun dengan kurikulum yang belum tertulis tetapi sudah mengacu pada standard yang baku yang menekankan pada kemurnian tauhid, fikih, tarikh, Bahasa Arab beserta baca dan tulisnya yang bersumber kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, serta buku-buku karya para ulama. Pendidikan diselenggarakan dalam keluarga serta di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di langgar, masjid, dan atau pesantren. Pendidikan ini bertahan hingga sekitar awal abad ke-16 dengan datangnya bangsa Eropa yaitu Portugis kemudian Spanyol ke Nusantara.

Masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini kemudian diwarnai dengan kehadiran bangsa Barat ke Nusantara dengan membawa misi keagamaan yaitu Kristen Katholik dan Kristen Protestan, yang nanti akan dibahas tersendiri setelah ini. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan kedatangan bangsa Barat ini sebagaimana disebutkan oleh J.C. Van Leur dalam Suryanegara (2015) bahwa Nusantara dijadikan ajang Perang Agama Segitiga, (Suryanegara, 2015; 179) yaitu perang antara Kristen Katholik melawan Kristen Protestan serta melawan pribumi Islam di Nusantara. sebagaimana diketahui bahwa antara Kristen Katholik dan Kristen Protestan sendiri saling perang di negara asal mereka kemudian

dilanjutkan ketika mereka sama-sama sampai di Nusantara.

#### d. Masa Penjajahan Portugis dan Spanyol.

Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol pada awalnya adalah untuk melakukan pencarian bahan perdagangan yang akan dipasarkan di Eropa berupa rempah-rempah. Mereka sangat tertarik dengan rempah-rempah produksi wilayah Nusantara terutama dari daerah Maluku, karena selain harganya murah juga karena mutunya yang lebih unggul daripada produk rempah-rempah negara lain.

Dari kedatangan dan misi mereka sedikit-banyak telah memberikan warna dalam pendidikan di Nusantara. Portugis mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate dan Solor dalam rangka menjalankan misi penyebaran agama Katholik serta memberikan pendidikan bagi rakyat. Tetapi pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak masyarakat terkemuka, tidak mencakup seluruh masyarakat. Misi pendidikan ini adalah untuk penyebaran agama Katholik dengan menambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung.

Dari tujuan semula yang ingin berdagang rempah-rempah selanjutnya berkembang pada keinginannya untuk menyebarkan agama Katholik dengan menyertakan para missionaris dalam ekspedisinya. Disebabkan sistem perdagangan dari bangsa-bangsa ini yang tidak menguntungkan bagi para petani rempah-rempah, maka perdagangan serta misi penyebaran agama Katholik sering mendapatkan perlawanan dari para raja kerajaan Islam terutama dari Sultan Ternate. Dengan keadaan ini pula serta kekalahan mereka dalam perang melawan Belanda serta perdagangan rempah-rempah yang susah tidak lagi memberikan keuntungan yang besar, maka mereka pada akhir abad ke-16 meninggalkan Nusantara.

Pendidikan Islam saat ini tetap sebagaimana telah diterapkan pada masa sebelumnya dengan ditambah semangat untuk membendung misi penyebaran agama Nasrani (Katholik dan Protestan) serta semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan.

#### e. Masa Penjajahan Belanda.

Dengan kepergian bangsa Spanyol dan Portugis dari Nusantara, menjadikan Belanda tertarik untuk menggantikannya dengan tujuan yang sama dengan kedatangan Spanyol dan Portugis hanya perbedaannya agama yang

disebarkan Belanda adalah agama Kristen Protestan. Belanda datang ke Nusantara pada tahun 1596. Kemudian pada tahun 1602 Belanda mendirikan sarikat/kongsi dagang dengan nama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC ini merupakan kongsi dagang, sehingga kepemilikannya adalah oleh orang-orang Belanda yang berdagang, tetapi kemudian diserahkan kepada pemerintah Negeri Belanda pada tahun 1800. Aktivitas VOC dari yang semula hanya untuk tujuan dagang dan penyebaran agama lama kelamaan menjadi penjajah (kolonialis) bagi Nusantara, yang secara resmi Belanda menjajah Nusantara mulai tahun 1800.

Sebagai penjajah, Kolonial Belanda sudah banyak meraup keuntungan yang tak terhingga dari kekayaan Nusantara dengan cara menerapkan monopoli perdagangan hasil pertanian yang sangat dibutuhkan serta sangat laku di pasar dunia. Belanda melakukan penindasan, kekuasaan raja-raja dari kerajaan-kerajaan di Nusantara dirampas, saling diadu domba sehingga terjadi perpecahan dan perselisihan antar raja-raja di Nusantara. Selain itu Kolonial Belanda menerapkan stratifikasi sosial dengan membagi masyarakat menjadi lapisan tertinggi sampai lapisan terendah. Berikut urutan stratifikasi masyarakat di bawah jajahan Belanda: bangsa Belanda, golongan orang Timur Asing, golongan priyayi/bangsawan pribumi, serta golongan rakyat jelata.

Masa penjajahan Belanda ini terdiri atas dua kebijakan yang berbeda. **Pertama**, Pendidikan masa VOC non Pemerintah Negeri Belanda. Pendidikan di Nusantara pada masa penjajahan Belanda di bawah VOC yang waktu itu VOC belum dalam penanganan oleh pemerintah Negeri Belanda ini perlu dibahas tersendiri karena masa penjajahan VOC non pemerintah Negeri Belanda di Nusantara ternyata cukup lama yaitu kurang lebih 200 tahun. Pendidikan pada masa ini melanjutkan apa yang telah dirintis oleh untuk penyebaran agama, selain untuk tujuan menghasilkan para pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja dengan mengesampingkan tujuan peningkatan intelektualitas masyarakat. Kurikulum yang digunakan adalah pendidikan agama Protestan, membaca, dan menulis dengan lama pendidikan yang tidak ditentukan. Pendidikan ini juga tidak menunjukkan asas keadilan sebab pendidikan hanya diperuntukkan bagi

anaka-anak pegawai dan tidak diperuntukkan bagi anak-anak rakyat biasa. Jadi hanya kalangan tertentu saja yang mendapat pendidikan. Guru-gurunya juga oleh orang Belanda yang walaupun kemudian berangsur-angsur oleh pribumi yang telah dididik oleh Belanda. **Kedua**, Pendidikan masa VOC dalam Pemerintahan Negeri Belanda. Pada dasarnya pendidikan pada masa VOC non Pemerintah Negeri Belanda serta VOC dalam Pemerintah Negeri Belanda tidak mengalami perubahan yang berarti kalau tidak dibidang tidak ada perubahan. Pada masa ini juga terdiri dari beberapa periode, mengingat adanya perubahan pimpinan puncak daerah jajahan yang disebut Gubernur Jenderal. Kebijakan pendidikan tetap mengacu kepada kebijakan para gubernur jenderal tersebut walaupun banyak dari mereka yang sekedar meneruskan dari gubernur jenderal sebelumnya. Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan oleh penjajah Belanda ini juga tidak terlepas dari tuntutan masyarakat serta pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh para raja untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kebijakan-kebijakan pada masa itu terangkum pada keterangan di bawah ini, namun tidak semua gubernur jenderal akan dibahas disebabkan banyak yang meneruskan kebijakan pendidikan dari gubernur jenderal sebelumnya. (1) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan perintah kepada para bupati di Pulau Jawa untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kalangan rakyat, namun perintah ini tidak bisa berjalan karena kurangnya kesungguhan dari pemerintah Belanda sendiri. (2) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles memerintah pada periode 1811 sampai 1816, pada masa ini justru pendidikan bagi masyarakat sangat terabaikan. (3) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Capellen memerintah pada periode 1816 sampai 1826. Pada masa ini Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardt pada tahun 1816 berhasil membuat undang-undang pengajaran sebagai dasar pijakan dalam pendirian sekolah, tetapi undang-undang ini tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa bagi kemajuan pendidikan masyarakat di Nusantara walaupun juga dibuat peraturan pemerintah yang menyertainya. Pendidikan hanya dinikmati oleh orang-orang Belanda dan

golongan Pribumi penganut Protestan saja. Memang di bawah pemikiran Reindwardt terwujud Kebun Raya Bogor yang merupakan pusat riset dan pengembangan tanaman khas Nusantara, tetapi ini hanya untuk kepentingan Negeri Belanda untuk dikembangkan di Belanda. (4) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal J.G. Van den Bosch. Van den Bosch memerintah pada periode 1830 sampai 1834, secara politik dia mengeluarkan kebijakan politik Culturstelsel (Politik Tanam Paksa) yang membutuhkan tenaga kerja murah dan pegawai rendahan. (5) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen. Berkuasa sejak 1845 sampai 1851. Dengan adanya politik culturstelsel, maka diperlukan tenaga kerja yang banyak terutama tenaga/pegawai rendahan. Sejak tahun 1848 di pulau Jawa banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tidak lepas dari tujuan didirikannya sekolah, yaitu untuk memperoleh tenaga kerja yang murah atau pegawai rendahan tadi. Sekolah-sekolah yang didirikan cukup banyak untuk ukuran waktu itu, yaitu sebanyak 20 sekolah ada setiap karesidenan. Sekali lagi bahwa sekolah ini didirikan selain dengan tujuan di atas, bahwa sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak pribumi golongan priyayi/bangsawan kemudian anak-anak pribumi dari golongan rakyat jelata tidak diperkenankan. Pada masa ini istilah Indonesia muncul untuk menggantikan istilah wilayah Nusantara. Istilah Indonesi dimunculkan oleh seorang ethnografist berkebangsaan Inggris pada tahun 1850 dalam karya ilmiahnya. Kemudian istilah wilayah Indonesia akan kami gunakan untuk menyebut dan menggantikan penyebutan wilayah Nusantara. (6) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele. Ia berkuasa sejak 1861 sampai 1866 dan pada tahun 1864 mengeluarkan kebijakan bahwa penduduk pribumi boleh diterima selain sebagai pegawai rendahan juga diperbolehkan untuk diterima sebagai pegawai menengah pada kantor-kantor dengan persyaratan tertentu, terutama lulus ujian. Untuk keperluan itu didirikanlah HBS (Hogere Burger School) semacam sekolah menengah. (7) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Pieter Mijer. Ia berkuasa dari tahun 1866 sampai 1872 dan mendirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan pada tahun 1867. Ini untuk kebutuhan pemenuhan tenaga kerja

serta pengendalian peribadatan dan penyebaran agama Kristen Protestan. Lagi-lagi, anak-anak dari kalangan pribumi rakyat jelata belum bisa menikmati pendidikan ini. (8) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Pieter Mijer. Dia berkuasa antara tahun 1866 sampai 1872, dengan mengeluarkan Undang-undang Agraris, yang berimplikasi pada perluasan tanah serta usaha pertanian, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih banyak lagi yang sekaligus semakin memperluas pendidikan dengan pendirian sekolah-sekolah baru. (9) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Carel Herman Aart van der Wijck. Berkuasa antara tahun 1893 sampai 1899 dengan mengeluarkan kebijakan deferensiasi sekolah pada tahun 1893, yaitu dengan membagi sekolah untuk Bumi Putera dengan deferensiasi Sekolah Kelas I untuk golongan para priyayi serta Sekolah Kelas II untuk golongan rakyat jelata. Dengan perbedaan ini sekaligus menimbulkan kesenjangan pada pendidikan itu sendiri. (10) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz. Memerintah antara tahun 1904 sampai 1909, dengan mengeluarkan kebijakan Politik Etis, ini dimaksudkan untuk membalas jasa serta menciptakan kaum terdidik bagi rakyat Nusantara. tetapi ini sebenarnya juga ada maksud tersembunyi yaitu agar Belanda tetap dapat menikmati kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Politik Etis ini dijalankan dengan cara mengeluarkan kebijakan tentang sekolah Bumi Putera sehingga berdiri Sekolah Desa yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh desa, biaya ditanggung oleh desa bukan oleh Gubernur serta memberi corak kebelandaan pada Sekolah Kelas I. (11) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg. Berlangsung antara tahun 1909 sampai 1916, pada tahun 1914 mengeluarkan kebijakan dengan mengubah Sekolah Kelas I menjadi HIS (Holands Inlandse School) dengan lama pendidikan enam tahun menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Politik ini memberikan dampak pada perpecahan anak-anak golongan pribumi, yang satu merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya. (12) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff. Berkuasa antara tahun 1926 sampai 1931, pada masa ini pengembangan pendidikan untuk Bumi Putera mengalami

kesulitan disebabkan oleh kekurangan dana. Dana dari Pemerintah Negeri Belanda kepada Gubernur wilayah jajahan selain untuk pengembangan pendidikan juga untuk biaya politik (mempertahankan eksistensinya) bahkan untuk biaya perang dalam rangka menumpas perlawanan wilayah jajahan untuk merdeka. Sampai di sini peran pendidikan Belanda terhadap masyarakat sangatlah kecil, walaupun ada itu hanya untuk kepentingan Belanda sendiri dengan motif pengerukan kekayaan atas wilayah Indonesia. Data jumlah penduduk wilayah Indonesia tahun 1940 adalah 68.632.000 dengan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan hanya sebanyak 3,32 %. (13) Masa kekuasaan Negeri Belanda di bawah beberapa Gubernur Jenderal sampai tahun 1949. Belanda semakin berat menanggung beban pembiayaan pendidikan, disebabkan oleh semakin terkoordinasikannya perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda. Ditambah keterlibatan Belanda dalam Perang Dunia II. Selain Belanda tidak dapat menahan invasi Jerman, Belanda juga harus menanggung beban berat dalam melawan Jepang di Asia Tenggara. Dengan ini pendidikan jelas sudah tidak terpikirkan lagi bagi Belanda dalam perannya untuk perkembangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Nilah, periodisasi peran pendidikan penjajah Belanda atas Indonesia. Peran ini tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, Belanda menyelenggarakan pendidikan di Indonesia semata-mata hanya untuk kepentingan keberlangsungan penjajahan Indonesia demi pengerukan kekayaan Indonesia untuk kemakmuran Negeri Belanda. Tilar (1995) menyebut ciri-ciri pendidikan masa penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu: (1) Dualisme pendidikan adalah untuk peranakan Belanda dan Bumi Putera; (2) Sistem Konkordasi adalah sistem pendidikan disesuaikan dengan sistem pendidikan di Belanda menjadikan kaum Bumi Putera terasing atas budayanya sendiri; (3) Sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh penjajah Belanda; (4) Penghambatan pergerakan nasional untuk kemerdekaan; (5) Muncul lembaga pendidikan swasta yang militan untuk perjuangan kemerdekaan.

Dari keterangan Tilar terutama point (5) tersebut menunjukkan dengan kondisi peran pendidikan oleh Belanda yang sangat minim

tidak mempengaruhi semangat masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan sendiri, terutama dari kalangan umat Islam yang ingin menerapkan ajaran Islam, membendung laju kristenisasi, serta berjuang untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Sistem pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan sistem peralihan Hindu - Islam, pesantren, surau (langgar) ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat waktu tidak banyak mengharapkan peran dari penjajah Belanda dalam memajukan pendidikan Islam.

Sistem pendidikan di era penjajahan Belanda tidak memberikan tekanan sama sekali pada pengetahuan keagamaan, karena mereka lebih menitikberatkan pada kepentingan duniawi semata, bahkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan mereka di Indonesia (Isnaniah, 2019).

Tetapi terdapat anak-anak muda Islam terpelajar yang tetap berusaha untuk berdakwah selain membentuk organisasi-organisasi keagamaan juga membentuk organisasi politik yang bercirikan Islam, misalnya pada tahun 1905 Sarikat Dagang Islam (Suryanegara, 2016) berdiri dan pada 1911 berubah menjadi Sarikat Islam dipelopori oleh KH. Samanhudi bersama dengan HOS Tjokroaminoto dengan trilogy 'Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat', pada tahun 1912 berdiri Muhammadiyah dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan, pada tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama oleh KH. Hasyim Asy'ari, serta yang lainnya. Dan organisasi-organisasi ini sama sekali tanpa peran Belanda. Selain untuk menjaga kemurnian tauhid, pendidikan Islam pada masa ini adalah tuntutan untuk Indonesia merdeka.

Pendidikan Islam muncul dan berkembang di Nusantara sejak Islam masuk ke kepulauan ini yang dibawa oleh kaum sufi atau pedagang dari Timur Tengah, yang kemudian hidup membaaur dengan penduduk lokal. (4) Peran pendidikan Islam dimulai oleh para ulama di wilayah Nusantara waktu itu, antara lain Hamzah Fansuri (yang hidup semasa Sultan Iskandar Muda di Aceh Darrussalam pada 1607 - 1736), Syaikh Muhammad Yusuf Al-Makasari (di Makasar lahir tahun 1626), Syaikh Abdussamad Al-Palimbani (di Palembang), Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani (di Banten wafat tahun 1897), berikutnya adalah para Wali Sanga

yang diawali oleh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik wafat tahun 1419) , Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajad, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati Ulama yang lainnya adalah Syeik Burhanudin di Minangkabau, selanjutnya yang sangat terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol serta para pengikutnya.

Data yang lain menyebutkan, peran pendidikan Islam dimulai sejak Raja Majapahit menghadiahkan Pesantren Glagah Arum kepada Raden Patah, kemudian dilanjutkan oleh Wali Sanga di Jawa termasuk Pesantren Tegalsari di Ponorogo, pesantren yang dikelola Syeik Burhanudin di Minangkabau serta para ulama lainnya di wilayah Nusantara waktu itu. Data dari pemerintah Belanda terdapat 1.853 unit institusi pendidikan tradisional Islam beroperasi di Pulau Jawa pada tahun 1831, dengan jumlah murid sebanyak 16.556 orang. Angka ini merupakan campuran antara lembaga pendidikan dan pengajian biasa di masjid-masjid. Kemudian pada tahun 1885 berkembang menjadi 14.929 unit lembaga pendidikan Islam tradisional, 300 di antaranya merupakan pesantren (Sabarudin, 2015). Dengan berlangsungnya Perang Dunia II dari 1939 - 1945 serta terdesaknya Sekutu di Asia Timur, menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia, digantikan oleh Jepang.

#### f. Masa Pendudukan Jepang.

Berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945, ada hal yang menarik selama pendudukan Jepang dalam kebijakan pendidikan yaitu meskipun hanya kurang lebih tiga tahun, terjadi perubahan yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama, nama-nama sekolah diganti menggunakan nama sekolah Indonesia maupun Jepang serta menghilangkan kurikulum Bahasa Belanda. Kedua, bahasa pengantar di sekolah-sekolah wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Ketiga, para Kepala Sekolah yang biasa dipegang oleh orang-orang Belanda digantikan oleh guru yang dianggap senior di sekolah itu dari kalangan Bangsa Indonesia. Keempat, mengingat saat itu dalam suasana perang melawan Sekutu, para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang (Supriadi dan Hogenboom, 2003: 15). Inilah yang bisa dikategorikan sebagai bentuk romantisasi pendidikan publik sebagai "penyeimbang besar" atau great equalizer, terutama

dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan status-quo yang militeristik.

Demikian gambaran kondisi pendidikan di Indonesia terutama pendidikan Islam sebelum kemerdekaan, yang jika ditarik kesimpulan diperoleh bahwa; (1) pendidikan di Indonesia terutama pendidikan Islam tidak mendapatkan perhatian dari para penjajah dengan tujuan untuk kepentingan status quo, (2) terutama pendidikan Islam, masyarakat menyelenggarakan secara mandiri walaupun dengan sistem sederhana yaitu konsep halaqah di mushala, masjid atau tempat lainnya yang dipandu oleh para ulama bermuatan mempertahankan tauhid, menetralisasi kristenisasi, serta semangat kemerdekaan (Sabarudin, 2015).

### 3. Politik Pendidikan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

#### a. Orde Lama.

Politik pendidikan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan pada waktu itu. Orde lama merupakan istilah untuk menyebut suatu periode kepemimpinan Presiden Soekarno dari sejak kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Keadaan politik yang masih belum menentu pada masa setelah kemerdekaan menjadikan pendidikan di Indonesia belum mengalami perkembangan yang cukup berarti sebagai negara yang merdeka. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang tidak stabil. Berbagai pihak berusaha untuk mengambil peran dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya beberapa kali pemberontakan turut menyumbang lambatnya perkembangan pendidikan Islam. Misalnya, pemberontakan PKI di Ciebon tahun 1946, pemberontakan PKI di Yogyakarta tahun 1946 (Suryanegara, 2016: 484), PKI Madiun 1948, pemberontakan Republik Maluku Selatan 1950, pemberontakan DI/TII 1951, pemberontakan PRRI/PERMESTA 1957, serta pemberontakan G30S/PKI 1965. Pemerintah pun kebijakan pemerintah, dalam hal ini presiden Soekarno bahkan menyampaikan dalam pidatonya pada peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961 menyatakan bahwa Nasional-Agama-Komunis (NASAKOM) merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Bahkan untuk partai politik Islam pada tanggal 17 Agustus 1960, Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden

(Keppres) No. 201 tahun 1960 (Suryanegara, 2016: 403).

Kebijakan pendidikan Islam di sekolah umum pada masa ini belum memenuhi harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang menjadikan agama sebagai benteng moral bangsa. Keputusan memberikan pelajaran agama Islam di sekolah baru mulai kelas IV ini berjalan terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan (Sabarudin, 2015). Hasil penelitian yang lain disimpulkan bahwa kedudukan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) belum kokoh karena tidak menjadi pelajaran wajib serta tidak ikut menentukan kenaikan kelas, bahkan orangtua siswa bisa memilih apakah anaknya akan mengikuti Pelajaran Agama Islam atau tidak (Kosim, 2014).

Berdasarkan sejarah perjuangan sudah sangat dimaklumi bahwa peran ulama serta umat Islam dalam perjuangan untuk mengusir penjajah dari Indonesia sangatlah besar, bahkan sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini pemegang peran utama adalah mereka (Suryanegara, 2016: 201) Berdasarkan hasil kajian historis dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan (Wahyuddin, 2016).

#### b. Orde Baru

Orde ini ditandai kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden Soeharto yang secara resmi mejadi presiden pada 27 Maret 1968 berdasar atas Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968. Masa ini adalah masa pembersihan sisa-sisa PKI melalui upaya hukum berdasarkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Juga mengusahakan untuk stabilisasi nasional dengan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara serta menyelenggarakan pemilihan umum yang hanya diikuti oleh tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Secara politik kebijakan ini dapat membuat stabilisasi nasional yang nyata, sampai terjadi gerakan reformasi tahun 1998 yang dimotori oleh mahasiswa dengan diawali adanya tuntutan pembersihan pemerintahan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bidang pendidikan pada masa ini tetap tidak bisa lepas dari unsur politik dan

kebijakan, tergantung dari siapa yang berkuasa pada waktu itu. Kebijakan politik Orde Baru yang terkait bidang pendidikan adalah diselenggarakannya Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pendidikan ini dilakukan melalui penataran-penataran yang lazim disebut dengan Penataran P4. Tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila sehingga terbentuk persatuan nasional, yang berbeda dari keadaan orde lama dengan multi partainya.

Penelitian oleh Yuningsih (2015) didapatkan fakta bahwa pendidikan pada masa Orde Baru adalah sistem pendidikan yang tersentralisasi dengan kualitas semakin buruk (Yuningsih, 2015). Pendidikan pada masa ini adalah pendidikan yang tidak untuk peningkatan standard kehidupan terlebih untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia, tetapi pendidikan yang berorientasikan politi sehingga semua orang selalu mematuhi setiap kebijakan pemerintah (Yuningsih, 2015). Masyarakat harus berusaha untuk perjudan pendidikan Islam yang lebih maju, dengan dorongan dari kebijakan pemerintah yang ada. Pada masa ini memang pemerintah memberikan kebijakan bahwa pendidikan agama harus diajarkan dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT). Pendidikan Islam semakin berkembang dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan serta program-program kegiatan, yang tentu saja tidak secara bebas sesuai dengan keinginan pribadi, tetapi tetap harus dengan pengawasan pemerintah melalui program asas tunggal Pancasila.

Sebagaimana tujuan penciptaan manusia menurut Al-Qur'an adalah adalah hanya untuk beribadah ('abd) kepada Allah: "Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka untuk beribadah ('abd) kepada-Ku." (Q.S. Ad-Dzariyat: 517) Ayat yang lain menyebutkan, "Dan (ingatlah) ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menciptakan khalifah di bumi.'" Mereka (para malaikat) berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menunpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (Q.S. Al-Baqarah: 30) Dari hal ini Nurcholis Madjid berpemikiran dalam Syafe'i (2015) bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah 'abd dan khalifah (Syafe'i,

2015). Agar manusia dapat memahami tujuan ini maka diperlukan media untuk penyampaiannya, tidak lain adalah melalui jalur pendidikan agama Islam, baik pendidikan keluarga (informal), masyarakat (nonformal), serta institusi pendidikan (formal).

c. Orde Reformasi.

Orde reformasi adalah penamaan suatu periode setelah lengsernya Soeharto setelah adanya gelombang unjuk rasa dari mahasiswa yang menuntut kemundurannya dari jabatan presiden. Pengunjukrasa menuntut Presiden Soeharto mundur disebabkan budaya KKN yang menjangkiti sistem pemerintahan di Indonesia. Soeharto resmi mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian jabatan presiden diteruskan oleh wakil presiden Pro. Dr. Ing. B.J. Habibie.

Secara berturut-turut kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Jend. (Purn) Susilo Bambang Yudoyono, dan Ir. Joko Widodo yang sekarang menjabat untuk periode kedua.

Kebijakan pendidikan pada masa reformasi ini mengalami beberapa perubahan. Hal ini termanifestasikan ke dalam penetapan kurikulumnya (Zulkarnain, 2018), **Pertama**, Kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999. Untuk kebijakan Pendidikan Agama Islam masih relative sama dengan kurikulum sebelumnya. **Kedua**, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 (KBK 2004). Kekhasan kurikulum ini adalah pada target kompetensi peserta didik, metode pengajaran, serta penilaiannya. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ada tuntutan untuk penguasaan kompetensi sesuai dengan karakter materinya. **Ketiga**, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KSTP 2006). Kurikulum ini menekankan pada otonomi kurikulum sekolah, dengan menyesuaikan potensi masing-masing. Proses pembelajaran dan penilaiannya berbasis tematik dengan tujuan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah. Di sini untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat peluang untuk melakukan pengembangan baik materi maupun metode seta penilaiannya. **Keempat**, Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum ini memberikan peluang seluas-luasnya bagi pengembangan potensi sekolah. Kurikulum ini memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan bekal selain ilmu pengetahuan, juga penanaman sikap dan keterampilan, sehingga diharapkan dapat menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Proses

pembelajaran dan penilaiannya berbasis tematik, bedanya dengan KTSP 2006 adalah pada blended tema, di KTSP 2006 nuansa mata pelajaran masih terlihat jelas. Evaluasi dikenakan pada setiap Kompetensi Dasar (KD) yang direkap dalam empat Kompetensi Inti (KI), yaitu KI-1 (Kompetensi Inti Sikap Spiritual), KI-2 (Kompetensi Inti Sikap Sosial), KI-3 (Kompetensi Inti Pengetahuan), dan KI-4 (Kompetensi Inti Keterampilan). KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standard kompetensi lulusa yang harus dimiliki oleh peserta didik, sedangkan KD adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik yang mengacu pada KI. Permasalahannya adalah untuk Pendidikan Agama Islam pada KI-1 belum mencakup seluruh kompetensi ruhiyah, misalnya masalah pengamalan sendi-sendi agama dalam ibadah shalat, pengamalan do'a-do'a, membaca Al-Qur'an, serta yang lainnya. Di sinilah sekolah-sekolah yang berbasis Islam harus mampu melaksanakannya.

Mengingat bahwa orde sekarang (orde reformasi) ini sudah memasuki era globalisasi yang tak terkendali yaitu era/masa disrupsi yang merupakan bagian dari era revolusi industry 4.0, maka perlu disiapkan generasi yang unggul yang mampu untuk mengimbangi tantangan kehidupan ini. Generasi yang selamat secara dunia dengan perkembangan zamannya serta selamat akan akhirnya dengan tetap berpegang teguh pada kemurnian tuhid dan pengamalannya. Masa sekarang ini adalah masa di mana arus informasi sangat deras, tuntutan pemenuhan kebutuhan sangat cepat, teknologi yang berbasis internet berkembang sangat pesat. Banyak sistem yang sudah menerapkan sistem digitalisasi, yang disebut masa/era disrupsi. Era disrupsi adalah masa ketika perubahan sedemikian cepat tidak terduga, mendasar, dan hampir semua aspek kehidupan, bahkan dalam politik akan mendorong digitalisasi sistem politik (Bashori, 2018).

Strategi politik pendidikan yang harus ditempuh untuk menghadapi abad ke-21 adalah menyeleksi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk diajarkan kepada peserta didik dan secara aktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan dunia (PH, 2014). Nilai-nilai yang perlu diseleksi adalah nilai-nilai

sosial yang perlu disesuaikan dengan karakter dan budaya bangsa. Sedangkan nilai-nilai yang berasal dari agama Islam adalah nilai-nilai yang akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang selalu memegang teguh dan menjaga keimanannya serta selalu mengamalkan amal-amal shalih, sebagaimana firman Allah, "Demi waktu ('ashr). Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal shalih dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran dan saling menasihati agar menepati kesabaran." (Q.S. Al-'Ashr: 1 – 3) (Kemenag, 2020).

Masa disrupsi adalah masa di mana hampir segala aspek kehidupan berjalan secara digitalisasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat ditempuh dengan pemanfaatan platform atau software secara online, di mana peserta didik dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya secara jarak jauh tidak dalam pertemuan tatap muka secara klasikal di kelas. Selain itu, jika dirasa kurang atas materi yang mereka dapatkan dari gurunya, peserta didik dapat menelusuri melalui internet untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan mendalam. Dalam penanaman keterampilan, peserta didik juga dapat menggali dari internet melalui tutorial-tutorial yang banyak tersebar di media sosial.

Pengembangan materi pendidikan disesuaikan dengan perubahan zaman yang terjadi dengan optimalisasi alat peraga serta aplikasi pada *smart phone* (Rahmawati, 2018).

Namun demikian tidak halnya dengan sikap sosial dan sikap spiritual. Peserta didik harus dapat melihat contoh pelaksanaannya dari para guru. Misalnya, bagaimana peserta didik harus menerapkan sikap hormat kepada orangtua atau orang yang lebih tua, saling mengasihi, empati, tolog-menolong, serta sikap-sikap pembangun kekuatan karakter yang lain, bahkan dalam hal tata cara peribadatan seperti wudhu, adzan, shalat, tayyamum, pelafalan bacaan Al-Qur'an dan do'a-do'a serta peribadatan-peribadatan lainnya. Maka di sini peserta didik perlu contoh, tauladan, serta bimbingan dari para guru. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah (Al-Ahzab: 21)(Kemenag, 2020).

Keteladanan Rasulullah ini diikuti oleh para shahabat yang sebaiannya menjadi ulama dalam kehidupan mereka, dari para shahabat kemudian diikuti oleh para tabi'in yang sebagiannya menjadi ulama, dari para tabi'in diikuti oleh para tabi'ut tabi'in yang sebagiannya menjadi ulama, selanjutnya dari mereka diikuti oleh generasi-generasi berikutnya dan para ulama. Kehidupan mereka yang meneladani Rasulullah ini berada dalam kemuliaan serta jaminan akan kehidupan akhirat. Dari sini, bahwa dalam menjalankan syari'at-syariat Islam perlu adanya keteladanan. Begitu juga para peserta didik dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam butuh keteladanan, jadi sistem pembelajaran online tetap perlu diadakan pembelajaran yang menekankan keteladanan.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan yang didasarkan pada data literatur sebagaimana sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal yakni (1) Arah dan sistem pendidikan Islam sudah mulai sejak Islam masuk ke bumi Nusantara dengan tujuan penyebaran agama Islam serta mereduksi paham animism dan dinamisme yang bertentangan dengan aqidah Islam; (2) Pendidikan Islam tidak mendapatkan perhatian pada masa penjajahan, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, serta Jepang, tetapi tetap dilakukan oleh para ulama dan pengikutnya dengan tujuan melanjutkan misi dakwah sebelumnya serta membendung arus kristenisasi memupuk semangat kemerdekaan dari penjajah; (3) Pemerintah cukup memberikan membrikan kesempatan bagi perkembangan dakwah dan pendidikan Islam dengan adanya semakin berkembangnya peluang sejak dari awal kemerdekaan sampai era reformasi; (4) Arah pendidikan Islam bisa mengikuti perkembangan di masa disrupsi ini, namun peserta didik tetap memerlukan sistem yang memungkinkan untuk mendapatkan keteladanan dari para gurunya;

(5) Dalam hal ini penulis menyarankan agar: **Pertama**, politik pendidikan Islam diarahkan untuk tetap mempertahankan kemurnian tauhid serta mempertahankan kemerdekaan, **Kedua**, politik pendidikan Islam harus bebas dari politik ideologi atheis, baik itu yang berasal dari Komunisme, Leninisme, Marxisme serta ideologi politik anti Tuhan (anti Allah) lainnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, artikel riset literatur ini bisa terselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutama, M.Pd. Dosen Program Pendidikan Manajemen Administrasi Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dari awal sampai selesai penulisan artikel ini.
2. Teman-teman seangkatan pada Program Pendidikan Manajemen Administrasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang membantu dalam berbagi pengalaman untuk penulisan artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah : Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*.
- Arikunto, Sugiyono, dkk. (2019). Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli. Kanal Informasi.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Eriyanto, Eriyanto, 2018, Disrupsi, Jurnal Komunikasi Indonesia. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jkmi/article/view/9945/67546121> Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia
- Hidayat, N. (2015). Peran Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Era Global. *El-Tarbawi*. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art2>
- Isnaniah, Lailatul. (2019). Penelitian Literatur: Landasan Teori. <http://www.fadliyanur.com/2019/08/penelitian-literatur-landasan-teori.html>
- Kemenag. (2020). Qur'an KEMENAG. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Orde Lama. Karsa2.
- Machali, Imam., Hidayat, Ara. (2018), *The Handbook of Education Management* (Teori dan Praktik

- Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia), Jakarta: Premnadamedia Group.
- Muchsin, M. A. (2019). Kesultanan Peureulak Dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*.  
<https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3154>
- PH, S. (2014). Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377>
- Rahmawati, F. (2018). Kecenderungan Pergeseran Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pada Era Disrupsi. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*.  
<https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1752>
- Rizal, Muhammad Nur. (2017). Menghadapi Era Disrupsi. *Republika*.  
<http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/responses/article/download/553/216/>
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya UIN SGD*.  
<https://doi.org/10.1109/TASSP.1981.1163562>
- Saharman, S. (2017). Surau sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Minangkabau. *Pendidikan Islam: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*.
- Shabir U., M. (2016). Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*.  
<https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a4>
- Stapel, F.W. (1941) *Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indie*. Den Hag.  
<https://wikipedia.com/para-gunernur-jendral-belanda>.
- Sumarso. (2015). Standard Nasional Pendidikan: Standard Isi (KI dan KD Mata Pelajaran) Kurikulum 2013. <https://goeroendeso.wordpress.com/standar-nasional-pendidikan/standar-isi/ki-dan-kd-mata-pelajaran-kurikulum-2013/>
- Supriadin, S. (2014). Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*.  
<https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.250>
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2015). *Api Sejarah 1*. Bandung: Surya Dinasti.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2016). *Api Sejarah 2*. Bandung: Surya Dinasti.
- Syafe'i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Usuluddin*.
- Wahyuddin, W. (2016). Kontribusi pondok pesantren terhadap nkri. *Kajian Keislaman*.
- Widyaningrum, I. (2015). Desain Pembelajaran Materi Aritmatika Sosial Dengan Model Permainan Pasar-Pasaran. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika (SNAPTIKA)*.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya*.
- Zanaton, H. I., Salasiah Hanin, H., Tengku Intan Zarina, T. P., & Mohd Noor, S. (2016). Kualiti ilmu berasaskan kesahan dan kebolehpercayaan data dalam penyebaran ilmu Islam: Perbincangan berasaskan kajian kualitatif. *Jurnal Hadhari: An International Journal*.
- Zulkarnain. (2018). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Sejarah Massa Reformasi di SMA. *Istoria*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>